



Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

Kebijakan Penyusunan Anggaran TA 2021

"APBN DALAM RANGKA PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024"

Jakarta, 11 Oktober 2020





Gambaran Umum dan Capaian Pendidikan Islam 2015-2019

Jenis Jenjang	Usia (Tahun)	Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Umum			Pendidikan Umum Berciri Khas Islam	Pendidikan Pesantren							Pendidikan Keagamaan Islam	
		Formal	Non/In-Formal Berjenjang	Non/In-Formal Tanpa Jenjang		Formal			Non-Formal		Non-Formal			
						Pendidikan Muadalah	Pendidikan Diniyah Formal	Ma'had Aly	Pesantren Terpadu dengan Satuan/ Program Pendidikan Lain	Pesantren Pengkajian Kitab Kuning	Madrasah Diniyah Takmiliyah	Pendidikan Al Qur'an		
Tinggi		MK PAI pada PTU (N/A)		MP PAI pada Kursus N/A (NA)	PTKI 796 (975.711)			Ma'had Aly 35 (1.572)*	Satuan/ Program Pendidikan Lain 12.041 (2.742.520)	Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Mu'allimin 9.880 (484.714) Dan Kajian Kitab Kuning dipadukan dengan kurikulum Pendidikan umum [PKPPS ula, wustha, ulya] 1.597 (115.585)	Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah/Ula, Wustha, Ulya dan Aljami'ah 84.966 (6.369.382)*	TPQ, TQA, RTQ, PPTQ 127.493 (7.270.257)*		
Menengah	16-18	MP PAI pada SMA/LB/SMK 27.756 (8.289.515)	MP PAI pada Paket C 10.892 *) (449.005)		MA 8.807 (1.323.566)	SPM MA/Ulya 55 (13.481)	PDF Ulya 46 (3.590)							
Dasar	13-15	MP PAI pada SMP/LB 39.637 (8.206.973)	MP PAI pada Paket B 10.892 *) (224.419)		MTs 18.176 (2.883.546)	SPM MTs/ Wustha 41 (10.205)	PDF Wustha 28 (4.493)							
	7-12	MP PAI pada SD/LB 148.673 (21.333.561)	MP PAI pada Paket A 10.892 *) (84.161)		MI 25.593 (3.797.438)	SPM MI/Ula 2 (915)	PDF Ula - (-)							
PAUD	3-6	MP PAI pada TK/LB 92.045 (3.995.962)			RA 29.842 (1.240.608)		PAUD QU 7.637 (365.869)							
Jumlah Lembaga		308.111	10.892	(N/A)	83.213	98	74	35	12.041	11.477	84.966	127.493		
Jumlah Peserta Didik		41.826.011	757.585	(N/A)	10.220.959	24.601	8.083	1.572	2.742.520	600.299	6.369.382	7.270.257		
Jumlah Peserta Didik Yang Dilayani		69.821.269												

Pendidikan Karakter

- Pembinaan akhlak, budi pekerti dan karakter melalui integrasi nilai budaya dalam Pendidikan multicultural dan Pendidikan karakter ke dalam Pendidikan agama dan budi pekerti

Indeks Pengarusutamaan Gender

- IPG di Madrasah : 1,01 – 1,07 (> 1,00)
- IPG di PTKI/Ma'had Aly : 1,40 (> 1,00)

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

- Indeks Reformasi Birokrasi : 84/100
 - Nilai Zone Integritas : 80,73/100
 - Nilai Pelayanan Publik : 78/100
- Pilot proyek meningkatkan Indeks Zona Integritas

Produktivitas dan Daya Saing

- Daya serap lulusan PTKI di dunia kerja : 82,2%
 - Karyawan : 68,7 % (nas.: 67,6 %)
 - Wirausaha : 11,2 % (nas.: 10,4%)
- Terbangun 28 Madrasah Aliyah Unggul (Insan Cendekia)
 - Universitas Islam bertaraf internasional.



APK

- APK RA : 9,06 (26,36 %)
- APK MI/Ula : 13,10 (12,07 %)
- APK MTs/Wustha : 23,89 (26,47 %)
- APK MA/Ulya : 10,40 (12,55 %)
- APK PTKI/Ma'had Aly : 5,00 (16,70%)

KIP dan Beasiswa

- Tersalurkan KIP bagi 301.886 (67 persen siswa dari keluarga kurang mampu)
- Tersalurkan Beasiswa Bidik Misi 28.000 mahasiswa

Peningkatan Mutu

- Nilai rata2 UN MA Bahasa : 50,96
- Madrasah Negeri Akreditasi A : 48,6 %
- Program Studi PTKIN Akreditasi A : 17,2 %
- Guru berkualifikasi $\geq$ S1 : 72,08 %
- Guru bersertifikasi : 49,14 %
- Dosen yang berkualifikasi S3 : 13,92 %
- Guru Besar : 521 org



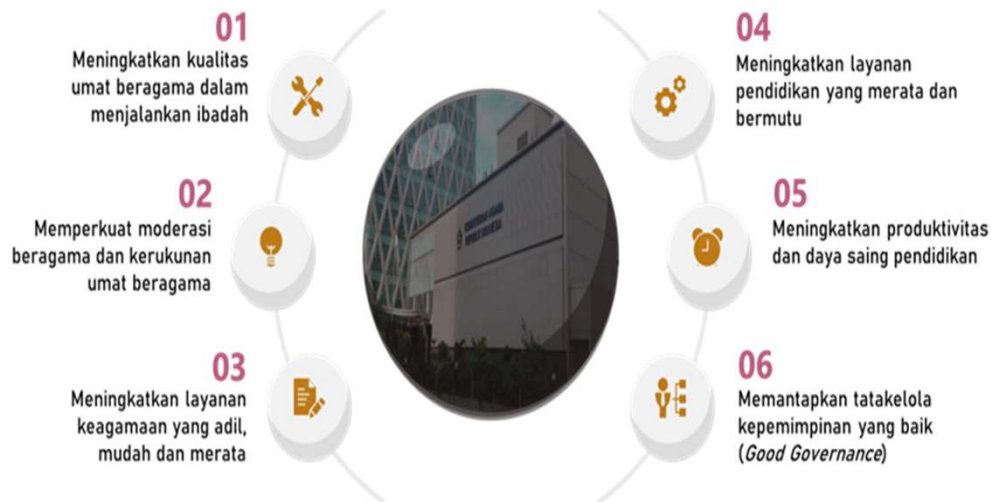
VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

VISI, MISI DAN TUJUAN 2020 - 2024

Visi Kementerian Agama :

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Misi Kementerian Agama :



Tujuan Kementerian Agama :



Note :

- ❖ Dalam menetapkan Visi, **Kementerian Agama** merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong**”
- ❖ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak memiliki visi tersendiri, dan mengikuti visi Kementerian Agama, demikian juga visi dan tujuan, tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan.



Tujuan dan Sasaran Strategis Pendidikan Islam

(Mengacu pada 6 Tujuan dan 12 Sasaran Strategis Kementerian Agama)

Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.



Sasaran Strategis Pendidikan Islam

(Mengacu pada 13 Sasaran Strategis Kementerian Agama)

1. Menguatnya moderasi beragama;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas;
4. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
5. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
7. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.



CASCEDING SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN DAN ARAH KEBIJAKAN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

SS 2**MENGUATNYA MODERASI BERAGAMA****SP**

Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

SASARAN KEGIATAN

1. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama di Perguruan Tinggi
2. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di Madrasah
3. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama
4. Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan

SS 6**MENINGKATNYA KUALITAS PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN****SP**

Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif
2. Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran
4. Menguatnya penyelenggaraan pendidikan Keterampilan
5. Meningkatnya kualitas pendidik keterampilan
6. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir

SS 7**MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS****SP**

Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
3. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah
4. Meningkatnya kualitas penanganan ATS

SS 8**MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENEMPATAN PENDIDIK****SP**

- Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan Pendidikan
- Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Meningkatnya kualitas penilaian Tenaga Pendidik
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan

SS 9

MENINGKATNYA KUALITAS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SP

Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

SASARAN KEGIATAN

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
2. Meningkatnya budaya mutu Pendidikan
3. Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

SS 10

MENINGKATNYA KUALITAS MENTAL/KARAKTER SISWA

SP

Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir Menguatnya pendidikan karakter siswa

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan

SS 11

MENGUATNYA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITAS

SP

- Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional
- Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian
- Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional
2. Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK
3. Meningkatnya kualitas lulusan PTK

SS 12

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

SP

Meningkatnya tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
4. Meningkatnya ASN yang professional
5. Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan

Dalam periode Renstra tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berhasil meletakkan pondasi dalam memantapkan peran terhadap penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun, memperluas akses PTKI yang bermutu, mengintensifkan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum melalui integrasi pendidikan karakter, budaya damai, dan moderasi beragama, serta memberdayakan kembali program pendidikan keagamaan Islam dan pesantren. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan sistem tatakelola dan penataan birokrasi yang berjalan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2015-2019 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut:



Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

01

Peningkatan kualitas moderasi beragama;

02

Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa;

03

Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas;

04

Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional;

05

Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;

06

Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;

07

Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional;

08

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel.



ALOKASI DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN 2021

Restrukturisasi Program Kementerian Agama 2020 - 2021

TAHUN 2020		TAHUN 2021	
1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA	DUKUNGAN MANAJEMEN	1
2	KERUKUNAN UMAT BERAGAMA		
3	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN AGAMA	KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	2
4	BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM		
5	PENDIDIKAN ISLAM	PENDIDIKAN TINGGI	3
6	BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN		
7	BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	4
8	BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU		
9	BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI dan WAJIB BELAJAR 12 TAHUN	5
10	PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH		
11	PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA		
12	PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL		



ALOKASI ANGGARAN 2021

KEMENTERIAN AGAMA RI

NO	UNIT ESELON 1	RUPIAH	%
1	Sekretariat Jenderal	2.280.046.995.000	3,41
2	Inspektorat Jenderal	170.124.955.000	0,25
3	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	52.523.995.372.000	78,44
4	Direktorat Jenderal Bimas Islam	5.757.112.044.000	8,6
5	Direktorat Jenderal Bimas Kristen	1.870.028.494.000	2,79
6	Direktorat Jenderal Bimas Katolik	899.724.298.000	1,34
7	Direktorat Jenderal Bimas Hindu	803.751.045.000	1,2
8	Direktorat Jenderal Bimas Buddha	272.661.176.000	0,41
9	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.593.301.172.000	2,38
10	Badan Litbang dan Diklat	693.143.361.000	1,04
11	Badan Penyelenggara JPH	97.497.916.000	0,15
JUMLAH		66.961.386.828.000	100



ALOKASI ANGGARAN 2021

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Berdasarkan Sumber Dana

Ribuan Rupiah

No	Uraian	Indikatif	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran	%
1	RUPIAH MURNI	45.775.153.051	46.076.594.783	46.076.594.783	87,72
3	RMP	18.436.000	18.436.000	18.436.000	0,04
4	BLU	1.994.677.846	2.012.669.077	2.012.669.077	3,83
5	PNBP	1.057.722.497	976.691.287	976.691.287	1,86
6	PHLN SFD	76.159.496	76.159.496	76.159.496	0,14
7	PHLN WORD BANK	584.207.421	584.207.421	584.207.421	1,11
8	SBSN MADRASAH	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2,86
9	SBSN PTKIN	1.259.067.647	1.279.237.308	1.279.237.308	2,44
Total Pagu		52.265.423.958	52.523.995.372	52.523.995.372	100

52,5
Triliun

TIDAK ADA
PERUBAHAN DARI
PAGU ANGGARAN KE
ALOKASI ANGGARAN
2021



Rincian Berdasarkan Program restrukturisasi Alokasi Anggaran 2021

Ribuan Rupiah

No	Program	Indikatif	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran	Selisih	Penanggungjawab
1	Program Dukungan Manajemen	25.178.510.277	25.178.510.277	25.178.510.277	-	Sekretaris Ditjen Pendis
2	Program Kualitas Pengajaran dan Pemberlajaran	6.830.375.647	7.173.388.981	6.846.540.477	- 326.848.504	Direktur PAI, Direktur KSKKM, Direktur PD Pontren dan Direktur GTK
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.631.660.022	13.957.601.413	13.923.755.022	- 33.846.391	Direktur KSKKM dan Direktur PD Pontren
4	Program Pendidikan Tinggi	6.624.878.012	6.214.494.701	6.575.189.596	360.694.895	Direktur PTKI dan Direktur PD Pontren
Total Pagu		52.265.423.958	52.523.995.372	52.523.995.372	0	

Ada pergeseran pada masing masing program, karena

1. Pergeseran pada anggaran 004 (RM Non Operasional Berkarakteristik Operasional pada Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran ke Program Pendidikan Tinggi
2. Adanya perubahan pada RO dan KRO pada masing masing program dan Kegiatan



Rincian Berdasarkan Jenis Belanja Alokasi Anggaran 2021

Ribuan Rupiah

No	Jenis Belanja, Sumber Dana	Indikatif 2021	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran	Selisih
1	RM 001 Belanja Pegawai PNS	23.541.303.106	23.541.303.106	23.541.303.106	44,82
2	RM 002 Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkant.	1.471.734.626	1.471.734.626	1.471.734.626	2,80
3	RM 004 Belanja Non Op Berkarakteristikopers.	17.199.368.838	17.199.368.838	17.199.368.838	32,75
4	RM NON OPERASIONAL	3.562.746.481	3.864.188.213	3.864.188.213	7,36
5	RMP	18.436.000	18.436.000	18.436.000	0,04
6	BLU	1.994.677.846	2.012.669.077	2.012.669.077	3,83
7	PNBP	1.057.722.497	976.691.287	976.691.287	1,86
8	PHLN SFD	76.159.496	76.159.496	76.159.496	0,14
9	PHLN WORD BANK	584.207.421	584.207.421	584.207.421	1,11
10	SBSN MADRASAH	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2,86
11	SBSN PENDIDIKAN TINGGI	1.259.067.647	1.279.237.308	1.279.237.308	2,44
Total Pagu		52.265.423.958	52.523.995.372	52.523.995.372	100,00

☐ Berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Dana, Alokasi Anggaran tidak ada perubahan dari pagu Anggaran



POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

1. Mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada (Gaji ke 13 dan THR), selisih tunjangan kinerja guru dan dosen serta mengantisipasi penerimaan CPNS baru;
2. Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran pada seluruh satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
3. Memenuhi Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS Madrasah dan Guru PAI di Sekolah;
 - a. TPG PNS Madrasah dialokasikan di DIPA Satker Madrasah Negeri (MTsN dan MAN) dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
 - b. TPG Non PNS Madrasah dialokasikan di DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama
 - c. TPG PNS dan Non PNS di Sekolah dialokasikan di DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

4. Memenuhi Belanja berkarakteristik Operasional (TPG Non PNS, Sertifikasi Dosen Non PNS di PTKIS, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah dan Pondok Pesantren, BOP RA, BOPTN, BOP Pendidikan Keagamaan Islam, Insentif Ustadz, Insentif Guru Madrasah dan Tunjangan Khusus Non PNS);
- a. Tetap menjaga target dan anggarannya, dan tidak dialihkan kepada rincian output yang lain
 - b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah dialokasikan sebagai berikut :
 - 1) BOS Madrasah Negeri dialokasi pada DIPA Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
 - 2) BOS Madrasah Swasta dialokasikan pada DIPA Pusat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
 - c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Pendidikan Pesantren dialokasikan pada DIPA Pusat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
 - d. Bantuan Operasional Raudlatul Athfal (BOP-RA) dialokasikan pada DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - e. Alokasi Insentif Guru Madrasah, Insentif Guru PAI, Insentif Ustadz Pondok Pesantren dan Ma'had Ali serta Tunjangan Khusus di Madrasah dialokasikan di DIPA Pusat



- f. BOP Pondok Pesantren dialokasikan pada DIPA Pusat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Tunjangan Profesi Dosen Non PNS pada PTKIS dialokasikan pada Satker Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam yang memiliki Kopertais.
- g. BOPTN dialokasikan sesuai dengan peruntukannya
- 5. Memenuhi semua Prioritas Nasional (PIP, KIP Kuliah dan Bidik Misi);
 - a. PIP Madrasah dan PIP Pondok Pesantren dialokasikan di DIPA Pusat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
 - b. KIP Kuliah dan Bidik Misi dialokasikan di Satker PTKIN dan Satker Pusat untuk PTKIS
- 6. Memenuhi kebutuhan mandatory (PIP, KIP Kuliah, Bidik Misi, Beasiswa Siswa Madrasah, Beasiswa Santri, Beasiswa Prestasi dan Pengembangan Akademik (PPA), Beasiswa Adiktis, Beasiswa Dosen, Beasiswa Guru, Pendidikan Profesi Guru
- 7. Meningkatkan kualitas belanja untuk memenuhi target Renstra yang telah ditetapkan;
- 8. Belanja barang, modal dan bantuan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada Mahasiswa dan Siswa
- 9. Penajaman belanja barang dan modal yang telah dibatasi oleh pemerintah



10. Melakukan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam Penggunaan Anggaran Belanja
11. Alokasi Anggaran yang bersumber dari SBSN sesuai dengan DPP (Daftar Paket Pekerjaan) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan
12. Mengefisienkan belanja kegiatan-kegiatan berskala Nasional pada Seluruh Direktorat dan Sekretariat
13. Mengefisienkan belanja birokrasi, manajerial dan tatakelola dan lebih mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
14. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melaksanakan kegiatan koordinasi, sosialisasi, workshop dan kegiatan sejenis, kecuali ada kegiatan yang mengharuskan untuk dilakukan di hotel
15. Memperhatikan belanja-belanja yang telah dibatasi pemerintah (pengadaan kendaraan dinas dan belanja perjalanan)
16. Sewa dan atau pembelian kendaraan dan peralatan kantor (computer, mesin foto copy, laptop, dll) harus memperhatikan data Barang Milik Negara (BMN)



**POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**



TERIMA KASIH